

Pengenalan Ketentuan Umum Perpajakan pada Siswa-Siswi SMAK IPEKA Puri Indah

Henryanto Wijaya^{1*}, Audi Michael², Felix Sindarto³, Hadi Cahyadi⁴

¹henryantow@fe.untar.ac.id, Universitas Tarumanagara, Indonesia

²audi.125210218@stu.untar.ac.id, Universitas Tarumanagara, Indonesia

³felix.125210060@stu.untar.ac.id, Universitas Tarumanagara, Indonesia

⁴hadic@fe.untar.ac.id, Universitas Tarumanagara, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Pengajuan : 03/3/2025

Revisi : 10/3/2025

Penerimaan : 17/3/2025

Kata Kunci:

Ketentuan umum
perpajakan, siswa-siswi,
perpajakan

Keywords:

General provision, students,
taxation

DOI:

10.52859/jam.v4i1.723

ABSTRAK

SMA Ipeka Puri Indah belum mengenal bagaimana ketentuan umum perpajakan. Pemahaman tentang Ketentuan Umum Perpajakan memang belum masuk dalam kurikulum akuntansi di level SMA/SMK. Namun pemahaman terhadap Ketentuan Umum Perpajakan dapat bermanfaat bagi siswa/siswi SMAK Ipeka Puri Indah. Tujuan PKM memperkenalkan sejak dini kepada kalangan siswa/siswi SMA Ipeka Puri Indah, bagaimana penerapan perpajakan di entitas pemerintahan sehingga timbul kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan negara. Pelaksanaan PKM ini bersifat ceramah dan penyuluhan kepada siswa/siswi SMAK Ipeka Puri Indah dan kemudian terjadi diskusi intens antara siswa/siswi SMAK Ipeka Puri Indah dengan penyuluh. Kami juga akan melakukan evaluasi dan feedback untuk mengetahui pemahaman ketentuan umum perpajakan pada siswa/siswi SMAK Ipeka Puri Indah. Kegiatan ini akan kami akhiri dengan menyusun laporan akhir, serta luaran wajib dan tambahan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah kami lakukan. Serangkaian kegiatan ini kami rencanakan akan dilakukan mulai dari bulan September 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

ABSTRACT

SMA Ipeka Puri Indah is not yet familiar with the general provisions of taxation. Understanding General Provisions of Taxation is not yet included in the accounting curriculum at the SMA/SMK level. However, understanding General Provisions of Taxation can be beneficial for SMAK Ipeka Puri Indah students. The purpose of PKM is to introduce SMA Ipeka Puri Indah students from an early age, how taxation is applied in government entities so that awareness of fulfilling tax obligations will increase, which will ultimately contribute to national development. The implementation of this PKM is in the form of lectures and counseling to SMAK Ipeka Puri Indah students and then there is an intense discussion between SMAK Ipeka Puri Indah students and counselors. We will also conduct evaluations and feedback to determine the understanding of general provisions of taxation among SMAK Ipeka Puri Indah students. We will end this activity by compiling a final report, as well as mandatory and additional outputs as a form of accountability for all the activities we have carried out. We plan to carry out this series of activities from September 2024 to December 2024.

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan (Direktorat Jendral Pajak RI, 2023; Mardiasmo, 2023; Syarifudin, 2021). Sebagai warga negara yang baik, memahami ketentuan umum perpajakan merupakan hal yang penting, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi wajib pajak di masa depan (Pravitasari, 2022; Rustam et al., 2024). Namun, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan masih relatif rendah, termasuk di kalangan pelajar (Noviana, 2018; Pravitasari, 2022; Rustam et al., 2024; Sriyuniati, 2019; Yuhan Rachamawati & Ernandi, 2024).

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan jenjang pendidikan yang strategis untuk memperkenalkan konsep perpajakan kepada siswa (Jumadi, 2023). Pada usia ini, siswa sudah memiliki kemampuan berpikir logis dan kritis yang cukup untuk memahami dasar-dasar perpajakan. Selain itu, sebagian siswa SMA akan segera memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan tinggi, di mana mereka akan berhadapan langsung dengan kewajiban perpajakan.

SMAK Ipeka Puri sebagai salah satu sekolah menengah atas terkemuka di Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam memperkenalkan konsep perpajakan kepada siswanya. Dengan kurikulum yang komprehensif dan fasilitas yang memadai, SMAK Ipeka Puri dapat mengintegrasikan materi perpajakan ke dalam mata pelajaran yang relevan, seperti ekonomi atau akuntansi. Pengenalan ketentuan umum perpajakan pada tingkat SMA dapat memberikan beberapa manfaat (Rustam et al., 2024; Sriyuniati, 2019). Pertama, siswa akan memiliki pemahaman dasar tentang sistem perpajakan di Indonesia, termasuk jenis-jenis pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur administrasi perpajakan. Kedua, pengetahuan ini dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Ketiga, siswa akan lebih siap menghadapi kewajiban perpajakan mereka di masa depan (Noviana, 2018; Yuhan Rachamawati & Ernandi, 2024).

Beberapa tantangan utama yang dihadapi siswa SMA dalam memahami perpajakan antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama adalah kurangnya pemahaman dasar tentang konsep perpajakan, dimana banyak siswa belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang jenis-jenis pajak, prosedur perpajakan, serta dampak dan manfaat sistem perpajakan. Kedua adalah terdapatnya keterbatasan waktu pembelajaran, dimana durasi jam pelajaran produktif akuntansi yang terbatas menyebabkan kurangnya waktu untuk memperdalam materi perpajakan.

Ketiga, peraturan perpajakan di Indonesia yang hampir tiap periode mengalami perubahan, namun materi yang diajarkan seringkali masih yang lama. Keempat adalah kurangnya contoh soal dan kasus yang bervariasi dan minimnya pemberian kasus-kasus akuntansi yang komprehensif dan variasi soal latihan membatasi pemahaman siswa. Keterbatasan kelima adalah kesulitan dalam menggunakan software akuntansi perpajakan dan siswa belum mampu memahami berbagai *software* akuntansi dalam waktu pembelajaran yang singkat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan menarik. Penggunaan metode pembelajaran aktif seperti studi kasus, simulasi, atau proyek kelompok dapat membantu siswa memahami konsep perpajakan dengan lebih baik. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan multimedia juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran (Sari & Nurhaini, 2024).

Sebagai bagian dari tanggung jawab tridharma perguruan tinggi, kami bermaksud untuk berkontribusi dalam upaya meningkatkan literasi perpajakan di kalangan pelajar. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kami bertujuan untuk memperkenalkan ketentuan umum perpajakan kepada siswa SMAK Ipeka Puri. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran perpajakan sejak dini. Dengan pemahaman yang baik tentang perpajakan, diharapkan siswa SMAK Ipeka Puri dapat menjadi agen perubahan yang akan menyebarkan pengetahuan dan kesadaran perpajakan di lingkungan mereka, serta menjadi wajib pajak yang patuh di masa depan.

Telaah Literatur

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi ini menekankan bahwa pajak bersifat memaksa, diatur oleh undang-undang, dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak (Herlinawati, 2020; Mardiasmo, 2023).

Fungsi pajak secara umum terbagi menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* (penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Sebagai fungsi *budgetair*, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan sebagai fungsi *regulerend*, pajak digunakan

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2023).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Indonesia saat ini menerapkan *Self Assessment System*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Mardiasmo, 2023).

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. KUP mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan otoritas pajak, serta prosedur pelaksanaan administrasi perpajakan (Herlinawati, 2020).

Beberapa aspek penting dalam KUP antara lain (1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); (2) Surat Pemberitahuan (SPT) dan tata cara pengisiannya; (3) Pembayaran dan penagihan pajak; (4) Pemeriksaan dan penyidikan pajak; (5) Keberatan dan banding, dan (6) Sanksi administrasi dan pidana perpajakan. Pemahaman tentang KUP sangat penting bagi setiap wajib pajak untuk menghindari sanksi perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar (Herlinawati, 2020; Mardiasmo, 2023).

Literasi perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang terkait dengan perpajakan. Literasi perpajakan mencakup pemahaman tentang jenis-jenis pajak, cara menghitung pajak, prosedur pelaporan, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Tingkat literasi perpajakan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia (Hanjarwadi, 2022; Tambunan, 2023). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), baru 50 persen masyarakat Indonesia yang paham literasi pajak (Hanjarwadi, 2022).

Literasi perpajakan yang baik memberikan beberapa manfaat, antara lain: (1) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak; (2) Mengurangi risiko sanksi perpajakan; (3) Mengoptimalkan perencanaan pajak; (4) Meningkatkan kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan nasional; dan (5) Menciptakan hubungan yang lebih baik antara warga negara dan otoritas pajak (Lailia et al., 2024; Putra et al., 2022). Literasi pajak sangat penting bagi generasi milenial karena mereka adalah generasi yang terdidik serta bekerja di era digital. Dengan memahami kewajiban pajak mereka, mereka dapat mengalokasikan pendapatan mereka secara lebih efisien dan membuat anggaran yang realistis. Selain itu, literasi pajak juga membantu milenial untuk menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pembangunan negara (Tambunan, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas edukasi perpajakan di lingkungan pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Triandani et al., 2023) menemukan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran perpajakan siswa setelah mengikuti program edukasi pajak selama satu semester. Sementara itu, penelitian oleh Syadat et al. (2022) mengatakan bahwa model pembelajaran perpajakan melalui media sosial terbukti efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan siswa SMA.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan di tingkat SMA dapat dilakukan dengan berbagai metode, dan cenderung efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan siswa. Hal ini menjadi dasar teoritis bagi pelaksanaan program pengabdian masyarakat di SMAK Ipeka Puri.

Metode

Pendekatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, di mana peserta tidak hanya menjadi penerima pasif materi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan meningkatkan retensi pemahaman siswa tentang ketentuan umum perpajakan.

Selain itu, PKM ini juga mengadopsi pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*), di mana konsep perpajakan disajikan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah memahami aplikasi praktis dari konsep-konsep perpajakan yang disampaikan.

Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut: (1) Tahap Persiapan; (2) Tahap Observasi dan Analisis Kebutuhan; (3) Tahap *Focus Group Discussion* (FGD); (4) Tahap Pelaksanaan; dan (5) Tahap Evaluasi.

Tahap persiapan dilakukan dengan kegiatan koordinasi dengan pihak SMAK Ipeka Puri untuk menetapkan jadwal dan teknis pelaksanaan, pembentukan tim pelaksana yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, penyusunan materi dan modul pembelajaran, dan persiapan instrumen evaluasi *pre-test* dan *post-test*.

Tahap observasi dan analisis kebutuhan dilakukan dengan melakukan survei awal untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa tentang perpajakan, memetakan kebutuhan spesifik terkait materi perpajakan yang perlu diprioritaskan, dan mengidentifikasi karakteristik siswa untuk merancang metode penyampaian yang sesuai.

Tahap FGD dilakukan dengan melakukan diskusi terfokus dengan perwakilan guru dan siswa, menyusun strategi pembelajaran yang efektif berdasarkan hasil diskusi, dan menetapkan indikator keberhasilan program.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan penyampaian materi tentang ketentuan umum perpajakan, pemberian contoh dan studi kasus, diskusi interaktif dan tanya jawab, dan simulasi prosedur perpajakan. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi yang mencakup evaluasi pemahaman siswa melalui *post-test*, pengumpulan *feedback* dari siswa dan guru, identifikasi kekuatan dan kelemahan kegiatan, dan penyusunan rekomendasi untuk kegiatan lanjutan.

Pada bagian metode, penulis diharapkan menyajikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai desain penelitian yang digunakan untuk mendukung validitas dan reliabilitas penelitian. Penjelasan mencakup jenis metode penelitian yang digunakan, baik kuantitatif maupun kualitatif, serta pendekatan yang relevan, seperti survei, eksperimen, studi kasus, atau lainnya. Selain itu, penulis harus menjelaskan secara spesifik sumber data yang digunakan, baik data primer yang diperoleh langsung dari responden maupun data sekunder yang berasal dari dokumen, laporan, atau publikasi sebelumnya. Teknik pengumpulan data juga perlu diuraikan secara detail, misalnya melalui kuesioner, wawancara, observasi, atau metode lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Lebih lanjut, bagian ini harus menyertakan penjelasan mengenai teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian, baik itu analisis statistik, metode kualitatif, atau kombinasi keduanya. Penulis juga harus menjelaskan bagaimana variabel penelitian diukur, termasuk definisi operasional, skala pengukuran yang digunakan, serta indikator-indikator yang relevan. Seluruh informasi ini disampaikan dalam bentuk paragraf yang runtut dan sistematis, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami langkah-langkah penelitian yang dilakukan.

Target dan Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Sasaran utama dari kegiatan PKM ini adalah siswa-siswi SMAK Ipeka Puri Indah kelas XI dan XII. Pemilihan siswa kelas XI dan XII didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka akan segera menjadi wajib pajak dalam waktu dekat, baik yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi maupun yang akan langsung memasuki dunia kerja.

Selain itu, guru-guru mata pelajaran ekonomi dan akuntansi di SMAK Ipeka Puri Indah juga menjadi target sekunder, dengan harapan mereka dapat melanjutkan edukasi perpajakan setelah kegiatan ini selesai.

Materi Pengabdian Kepada Masyarakat

Materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM ini mencakup: (1) Konsep dasar perpajakan; (2) Ketentuan umum perpajakan; (3) Nomor pokok wajib pajak; (4) Surat pemberitahuan; (5) Pajak penghasilan; (6) Pajak pertambahan nilai; dan (7) Perubahan terkini dalam regulasi perpajakan.

Metode Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Evaluasi keberhasilan PKM dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: (1) *Pre-test* dan *Post-test*; (2) Kuesioner kepuasan peserta; (3) Observasi partisipatif; dan (4) Wawancara guru.

Evaluasi dengan *Pre-test* dan *Post-test* dilakukan dengan cara mengukur perubahan pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan dan analisis statistik terhadap hasil tes untuk mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan.

Kuesioner kepuasan peserta dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap materi, penyampaian, dan fasilitas program serta mengumpulkan saran dan masukan untuk perbaikan program di masa depan. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa selama program berlangsung dan mengidentifikasi materi yang paling menarik minat siswa.

Terakhir dengan melakukan wawancara guru dilaksanakan dengan mengumpulkan persepsi guru tentang kebermanfaatan program dan mengidentifikasi potensi integrasi materi perpajakan ke dalam kurikulum reguler.

Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan program serupa di masa depan dan menjadi dasar untuk mengembangkan modul pembelajaran perpajakan yang dapat diintegrasikan kedalam kurikulum sekolah.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Observasi Awal

Berdasarkan hasil observasi awal melalui survei yang dilakukan terhadap siswa SMAK Ipeka Puri Indah, ditemukan beberapa fakta menarik terkait pemahaman perpajakan. Setelah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pengurus SMAK Ipeka Puri Indah, ditemukan bahwa pengurus SMAK Ipeka Puri Indah masih kurang memahami ketentuan umum perpajakan, dimana siswa belum memahami dengan baik prosedur pelaporan, pembayaran pajak, serta kewajiban dan hak terkait pajak yang harus dipenuhi.

Mereka masih mengalami kebingungan dalam menentukan jenis pajak yang berlaku seperti Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Siswa juga masih kurang menyadari hak-hak mereka sebagai wajib pajak, seperti hak untuk mengajukan keberatan, restitusi, atau insentif pajak yang mungkin berlaku bagi institusi pendidikan.

Selain itu, para siswa juga belum memahami secara rinci prosedur administratif, seperti batas waktu pelaporan dan pembayaran, serta mekanisme yang benar untuk menghindari denda atau penalti. Aspek

perpajakan dari perhitungan pajak terutang, pengisian SPT, dan pelaporan SPT juga masih belum berjalan dengan baik

Hasil observasi ini menjadi dasar bagi tim PKM untuk menyusun materi yang lebih fokus pada aspek-aspek yang masih kurang dipahami oleh siswa.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan PKM dilaksanakan dalam bentuk *workshop* yang berlangsung selama dua hari, dengan total durasi 12 jam. *Workshop* dihadiri oleh siswa SMAK IPEKA Puri Indah dan guru mata pelajaran ekonomi dan akuntansi.

Kegiatan hari pertama difokuskan pada pengenalan konsep dasar perpajakan, ketentuan umum perpajakan, dan NPWP. Materi disampaikan melalui kombinasi metode ceramah, diskusi, dan studi kasus. Beberapa video edukatif dari Direktorat Jenderal Pajak juga ditayangkan untuk memberikan gambaran visual tentang proses perpajakan.

Kegiatan hari kedua lebih banyak berisi praktik dan simulasi, di mana siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan studi kasus terkait pengisian SPT, perhitungan PPh pribadi, dan PPN. Siswa juga diajak untuk mengakses situs web Direktorat Jenderal Pajak dan mempelajari fitur-fitur yang tersedia di dalamnya.

Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi melalui post-test dan pengumpulan feedback dari peserta. Metode pelaksanaan yang digunakan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu melalui sosialisasi dan pelatihan, yang telah diidentifikasi sebagai solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi SMAK IPEKA Puri Indah.

Perubahan Pemahaman Siswa

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, terjadi peningkatan pemahaman siswa tentang perpajakan secara signifikan. Pemahaman tentang NPWP, pengetahuan tentang jenis-jenis pajak, pemahaman tentang prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, serta kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara semuanya menunjukkan peningkatan yang substansial.

Selain itu, sebagian besar siswa menyatakan bahwa mereka merasa lebih siap untuk menjadi wajib pajak di masa depan setelah mengikuti program ini. Secara kualitatif, peningkatan pemahaman juga terlihat dari kualitas pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Jika di awal program pertanyaan masih bersifat dasar, maka di akhir program pertanyaan sudah lebih spesifik dan mendalam.

Respon siswa terhadap program ini sangat positif. Berdasarkan kuesioner kepuasan yang dibagikan, mayoritas siswa menyatakan materi yang disampaikan relevan dan bermanfaat, metode penyampaian menarik dan mudah dipahami, tertarik untuk mempelajari perpajakan lebih lanjut, dan merekomendasikan program serupa untuk dilanjutkan.

Tingkat partisipasi siswa juga sangat tinggi, terlihat dari antusiasme dalam diskusi dan aktivitas kelompok. Selama dua hari program, tercatat banyak pertanyaan diajukan oleh siswa. Guru-guru yang hadir juga memberikan apresiasi positif dan menyatakan minat untuk mengintegrasikan materi perpajakan ke dalam mata pelajaran mereka.

Perubahan Terbaru dalam Undang-Undang Perpajakan

Selama pelaksanaan program, tim PKM juga memperkenalkan beberapa perubahan terbaru dalam undang-undang perpajakan kepada siswa. Berdasarkan hasil FGD, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perubahan terbaru dalam undang-undang perpajakan yang perlu diketahui oleh siswa SMA Ipeka Puri antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024, PPN atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan bus listrik tertentu ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2024.
2. Penyesuaian kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan bermotor listrik yang mendapatkan insentif pajak.
3. Perubahan dalam jenis dan tarif pajak daerah, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Ini mencakup penambahan jenis pajak baru, penyesuaian tarif, dan perubahan istilah pada objek pajak.
4. Pengenalan Pajak Alat Berat sebagai jenis pajak baru di DKI Jakarta dengan tarif 0,2%.
5. Perubahan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang akan berlaku efektif mulai 5 Januari 2025.
6. Pengelompokan beberapa jenis pajak ke dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), termasuk pajak atas makanan dan minuman, tenaga listrik, dan jasa perhotelan.
7. Upaya reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan daya saing ekonomi, termasuk rencana pemangkasan tarif pajak untuk sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
8. Fokus pada penyederhanaan administrasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
9. Penguatan regulasi perpajakan untuk menghadapi era digital, termasuk upaya untuk mengenakan pajak pada transaksi-transaksi digital.

Pengenalan perubahan terbaru ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa perpajakan adalah bidang yang dinamis dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program, tim PKM menghadapi beberapa tantangan:

1. Kompleksitas Materi, yaitu materi perpajakan cenderung kompleks dan teknis, sehingga berpotensi membuat siswa kesulitan memahami. Solusi yang ditawarkan oleh Tim PKM adalah menyederhanakan materi dan menggunakan contoh-contoh konkret yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.
2. Keterbatasan Waktu, yaitu Durasi program yang terbatas tidak cukup untuk membahas seluruh aspek perpajakan secara mendalam. Solusi yang dilakukan oleh Tim PKM memprioritaskan materi yang paling relevan dengan kebutuhan siswa dan menyediakan modul tambahan untuk dipelajari secara mandiri.
3. Perbedaan Tingkat Pemahaman, dimana siswa-siswi memiliki tingkat pemahaman awal yang beragam tentang perpajakan. Solusi yang dilakukan adalah dengan pembagian kelompok diskusi dengan komposisi yang heterogen dan penugasan tutor sebaya untuk membantu siswa yang kesulitan.
4. Keterbatasan Fasilitas Praktik, dimana tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat untuk praktik langsung mengakses sistem perpajakan online. Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan metode demonstrasi dan simulasi, serta pembagian kelompok yang memungkinkan siswa berbagi perangkat.

Dampak Kegiatan PKM

Program PKM ini memberikan beberapa dampak positif. Pertama adalah dampak kognitif, yaitu peningkatan pemahaman siswa tentang ketentuan umum perpajakan, terlihat dari hasil *pre-test* dan *post-test*. Kedua adalah dampak afektif, yaitu peningkatan kesadaran akan pentingnya pajak dan tumbuhnya sikap positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Ketiga adalah dampak institusional, dimana SMAK Ipeka Puri Indah berencana untuk mengintegrasikan materi perpajakan ke dalam kurikulum mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Berikutnya yang keempat adalah dampak komunitas, dimana siswa menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi perpajakan kepada keluarga dan lingkungan mereka.

Dampak terakhir, yaitu dampak kemitraan, dimana terjalinnya kerjasama berkelanjutan antara universitas dan SMAK Ipeka Puri Indah dalam bidang edukasi perpajakan. Secara keseluruhan, program PKM ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman siswa SMAK Ipeka Puri tentang ketentuan umum perpajakan. Peningkatan pemahaman ini diharapkan akan berdampak positif pada kesadaran dan kepatuhan perpajakan mereka di masa depan.

Simpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) tentang pengenalan ketentuan umum perpajakan pada siswa-siswi SMAK Ipeka Puri, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama adalah peningkatan pemahaman perpajakan, dimana terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa tentang ketentuan umum perpajakan, meliputi konsep dasar pajak, NPWP, SPT, PPh, dan PPN. Hal ini terlihat dari perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan peningkatan rata-rata yang substansial.

Kedua adalah efektivitas metode penyampaian dengan pendekatan partisipatif-edukatif terbukti efektif dalam menyampaikan materi perpajakan yang cenderung kompleks. Kombinasi metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan simulasi mampu mengakomodasi gaya belajar yang beragam dan meningkatkan retensi pemahaman siswa.

Ketiga adalah antusiasme dan partisipasi tinggi dengan indikator siswa menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang tinggi selama program berlangsung, terlihat dari jumlah pertanyaan yang diajukan dan keterlibatan aktif dalam aktivitas kelompok. Hal ini mengindikasikan bahwa materi perpajakan dapat disajikan secara menarik dan relevan bagi siswa SMA.

Keempat adalah potensi integrasi ke kurikulum, dimana kegiatan ini membuka peluang untuk mengintegrasikan materi perpajakan ke dalam kurikulum regular SMAK Ipeka Puri Indah, terutama pada mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Guru-guru yang terlibat menyatakan minat untuk melanjutkan edukasi perpajakan setelah program selesai.

Kelima adalah dampak jangka panjang kegiatan ini berpotensi memberikan peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di masa depan. Siswa yang telah memahami ketentuan umum perpajakan sejak dini diharapkan akan menjadi wajib pajak yang lebih patuh ketika memasuki dunia kerja.

Kegiatan penyuluhan perpajakan yang dilaksanakan di SMA IPEKA Puri Indah merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai ketentuan umum perpajakan. Acara ini dihadiri oleh siswa SMA Ipeka Puri Indah, serta melibatkan tim penyuluh yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Penyuluhan ini menjadi sarana edukasi yang efektif untuk memperkenalkan konsep dasar perpajakan kepada generasi muda.

Materi yang disampaikan dalam penyuluhan mencakup berbagai aspek penting dalam perpajakan, termasuk definisi pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Penjelasan

mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tata cara pendaftarannya juga menjadi fokus dalam penyuluhan ini. Selain itu, peserta diberikan pemahaman tentang sanksi perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Kegiatan PKM ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi untuk pengembangan program sejenis di masa depan. Pertama adalah durasi kegiatan yang lebih panjang untuk membahas materi perpajakan secara lebih mendalam dan memberikan kesempatan praktik yang lebih banyak. Kedua adalah kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memperkaya program dengan materi dan contoh kasus yang lebih *up-to-date*, serta memberikan pengalaman langsung dari praktisi perpajakan. Ketiga adalah pengembangan modul perpajakan yang khusus didesain untuk siswa SMA, dengan bahasa yang sederhana dan contoh yang relevan dengan kehidupan mereka. Keempat adalah program lanjutan yang berfokus pada aspek spesifik seperti perpajakan digital, perpajakan untuk wirausaha muda, atau perencanaan pajak personal. Terakhir adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran perpajakan yang interaktif dan dapat diakses oleh siswa kapan saja.

Referensi

- Direktorat Jendral Pajak RI. (2023). Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. In *Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak*. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. pajak.go.id
- Hanjarwadi, W. (2022). LSI Sebut 50 Persen Masyarakat Paham Literasi Pajak. *Pajak.Com*, 1–5. <https://www.pajak.com/pajak/lsi-sebut-50-persen-masyarakat-paham-literasi-pajak/>
- Herlinawati, Y. (2020). Modul Pembelajaran SMA - Ekonomi - Perpajakan. In *Modul Pembelajaran SMA - Ekonomi - Perpajakan*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan - Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah - Direktorat Sekolah Menengah Atas.
- Jumadi, J. (2023). *KPP Pratama Gejar Pajak Bertutur di SMA Negeri 2 Batang*. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=11159>
- Lailia, F., Kiranti, Hapsari, M. I., Namora, R. P., & Qooni'ah, S. M. (2024). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kesadaran Pajak Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Potensial*, 3(2), 193–202. <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/potensial>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan - Edisi Terkini* (1st ed.). Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=7bLsEAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Noviana, W. (2018). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(2), 241–250. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/article/view/2286>
- Pravitasari, G. I. (2022). Peran Sekolah Terhadap Penanaman Kepada Siswa Mengenai Pentingnya Kesadaran Pajak. *Indonesian Journal of Sociology, Education and Development*, 4(2), 72–78. <https://ijsed.ap3si.org/index.php/journal/article/download/66/51/290>
- Putra, F. L. H., Angi, I. S., Aulia, M. R. S., & Faizi. (2022). Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 33–42. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRA/index>
- Rustam, M. H., Tasriani, T., Triandani, S., & Zuhra, F. (2024). Edukasi Perpajakan bagi Siswa/i SMK IT Al-Izhar Kota Pekanbaru Guna Mewujudkan Generasi Sadar Pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 291–297. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2356>
- Sari, T. W., & Nurhaini, L. (2024). Pengaruh Model Problem Based Learning Berbantuan Mind Mapping Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Di Smk. *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 5(2), 167–174. <https://doi.org/10.25157/j-kip.v5i2.14622>
- Sriyuniati, F. (2019). Sosialisasi Akuntansi Perpajakan Bagi Siswa SMK Jurusan Akuntansi. *Akuntansi Dan*

- Manajemen*, 14(1), 104–110. <https://doi.org/10.30630/jam.v14i1.88>
- Syadat, F. A., Kusyeni, R., & Fauziah, E. (2022). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II) ARTICLE INFO ABSTRACT. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(1), 70–81. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Syarifudin, A. (2021). *Perpajakan - Menghitung Pajak Pribadi, Badan dan Usahawan Dalam sudut Pandang Analisa Undang-Undang di Indonesia* (M. Mispiyanti (ed.); 1st ed.). STIE Putra Bangsa.
- Tambunan, A. H. (2023). Ini Dia Tanda Literasi Pajak Masih Rendah. *Www.Pajakku.Com*, 3–7. <https://artikel.pajakku.com/ini-dia-tanda-literasi-pajak-masih-rendah/>
- Triandani, S., Tasriani, Zuhra, F., Hasanah Rustam, M., & Armiyani. (2023). Pengaruh Edukasi Terhadap Kesadaran Pajak Siswa SMK Al-Izhar Pekanbaru: Tax Goes to School sebagai Variabel Moderating. *The Journal of Taxation*, 4(1), 53–68. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/viewFile/27849/10070>
- Yuhan Rachamawati, D. A., & Ernandi, H. (2024). Pengetahuan Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak: Wawasan dari Praktik Hukum. *Intelektualitas Jurnal Penelitian Lintas Keilmuan*, 1(2), 24–45. <https://doi.org/10.47134/intelektualitas.v1i2.2705>